

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses perubahan terus menerus menuju kearah perbaikan di bidang ekonomi, yaitu mencakup pertumbuhan ekonomi. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani. Pertumbuhan ekonomi daerah ditandai dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa *output* yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Jawa Barat adalah provinsi yang memiliki 26 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar yang terdiri dari 625 kecamatan, 638 kelurahan dan 5.316 desa. Jawa Barat memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia

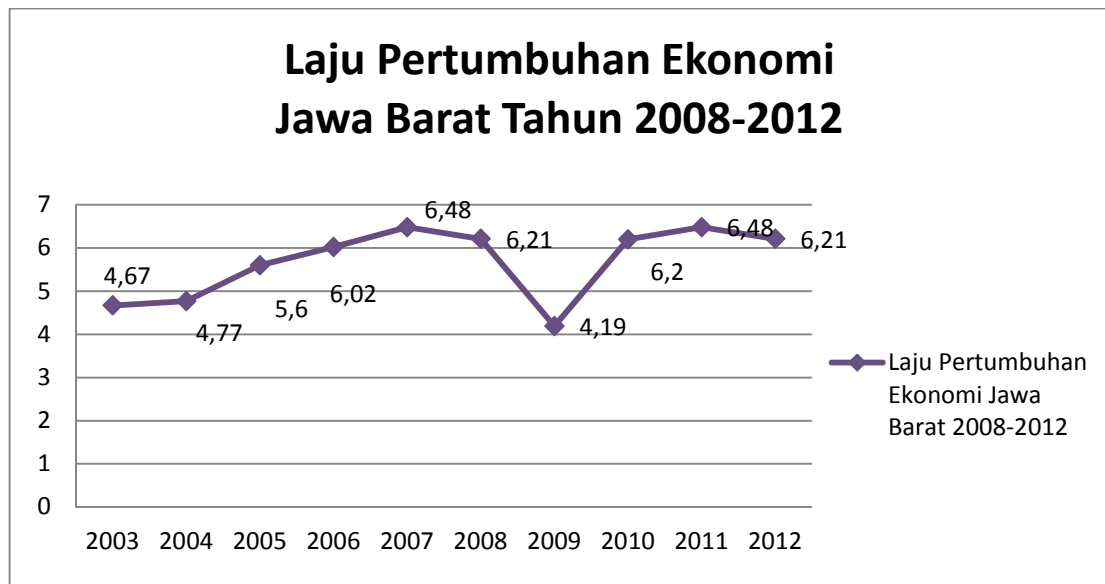
untuk lebih memilih hidup di Provinsi tersebut. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 penduduk Jawa Barat sebanyak 43.053.732 orang, merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan provinsi lainnya¹. Banyaknya jumlah penduduk ini dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Dengan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan yang cukup tinggi membuat Jawa Barat memiliki banyak kegiatan perekonomian. Namun pertumbuhan penduduk di Jawa Barat cenderung memiliki dampak negatif, hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk tidak diseimbangi oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti lapangan kerja yang tersedia. Hal ini menimbulkan banyaknya pengangguran. Pada Februari 2013 badan pusat statistik merilis data tentang kondisi ketenagakerjaan di seluruh provinsi Indonesia, dimana Jawa Barat termasuk provinsi paling besar jumlah penganggurannya adalah sebanyak 1.815.270 orang². Banyaknya penduduk pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan lingkungan dengan segala dampaknya seperti menimbulkan kemiskinan dan menurunnya kesejahteraan rakyat sampai menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menghambat pembangunan daerah Jawa Barat. Padahal presentase pertambahan output perkapita harus lebih tinggi daripada presentase pertambahan jumlah penduduk.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan PDRB setiap tahunnya. PDRB dapat memberikan informasi tentang besarnya aktivitas produktif masyarakat dan juga kemakmuran ekonomi masyarakat secara

¹Bidang Neraca Wilayah, *PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Penggunaan 2009-2010*, (Jakarta : BPS Provinsi Jawa Barat, 2011), hlm. 22

² Fatkhur Maskur, 2013, *Inilah 10 Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi*, <http://www.bisnis.com/industri/read/20130910/12/160039/inilah-10-provinsi-dengan-tingkat-pengangguran-tertinggi> (diakses tanggal 26 September 2014)

keseluruhan. Jika data ini disajikan menurut perkembangan waktu dan pengaruh harga telah dihilangkan, maka kita dapat mengetahui informasi tentang perkembangan aktivitas produktif dan kemakmuran tersebut secara riil. Bagi daerah Jawa Barat, mempercepat pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran yang harus dicapai agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebab, tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktifitas dan distribusi pendapatan. Berikut ini laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat :



Gambar I.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2008-2012
Sumber : BPS Jawa Barat, diolah

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat cenderung berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dari tahun 2003 hingga tahun 2007 dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 barulah mengalami penurunan dari 6,48% menjadi 6,21% kemudian menurun lagi menjadi 4,19% di tahun berikutnya. Penurunan ini terjadi sebagai dampak dari adanya krisis global.

Tahun 2010 pertumbuhan meningkat dengan laju pertumbuhan 6,2% dan terus meningkat pada tahun 2011 dengan 6,48%. Dan sedikit mengalami penurunan kembali pada tahun 2012 menjadi 6,21% yang disebabkan oleh meningkatnya inflasi³.

Pertumbuhan ekonomi sendiri salah satunya dipengaruhi oleh Sumber Daya Alam (SDA). SDA merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu Negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi⁴. Peranan penanaman barang-barang pertanian untuk ekspor, dan industri pertambangan minyak menjadi penggerak permulaan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sebagai bukti yang nyata mengenai besarnya peranan kekayaan SDA dalam tingkat permulaan pertumbuhan ekonomi. Namun, tersedianya sumber daya alam melimpah saja belum cukup bagi pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi di Negara Belanda, Jepang dan Korea Selatan membuktikan bahwa walaupun tidak memiliki kekayaan yang berarti tetapi perkembangan ekonomi yang pesat tetap terjadi. Hal demikian terjadi karena Negara tersebut dapat memanfaatkan sumber daya dengan tepat.

Untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam yang tersedia maka perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Sumber Daya Manusia ini merupakan faktor terpenting yang diperlukan dalam mengelola Sumber Daya Alam. Penduduk yang bertambah dapat menjadi pendorong maupun penghambat

³Kajian Ekonomi Regional, *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Barat Triwulan III – 2012*, 2012, http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jabar/pages/ker_jabar_tw312.aspx

⁴Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 429

dalam pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang besar akan menambah jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi⁵. Akan tetapi di sisi lain, akibat buruk dari penambahan jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh kesempatan kerja akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan.

Seperti yang sudah ditulis di atas Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang paling besar diantara Provinsi lain di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang tinggi dapat dijadikan sebagai pasar yang potensial untuk memasarkan hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas. Untuk memperbaiki kualitas penduduk diperlukan pendidikan sebagai salah satu modal dasar manusia untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan memiliki peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah daerah berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan.

Dilihat dari perkembangannya selama tahun 2004 sampai dengan 2009, rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2004 rata-rata lama sekolah mencapai 7,2 tahun dan terus meningkat hingga 7,7 tahun pada tahun 2009. Akan tetapi secara umum selama kurun waktu tersebut, rata-rata lama sekolah penduduk masih relatif rendah dan dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, yaitu baru mencapai sekitar kelas 8 atau kelas dua Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Atau dengan kata lain rata-rata penduduk di Indonesia baru mampu menempuh pendidikan hanya sampai kelas 7 atau kelas satu SLTP dan putus sekolah di kelas 8 atau kelas dua SLTP⁶.

Dan Tingkat pendidikan pekerja di Jawa Barat masih didominasi oleh lulusan tingkat pendidikan dasar. Berikut adalah tabel pekerja menurut pendidikan:

⁵ *Ibid.*, hlm.430

⁶ Badan Pusat Statistik, *Profil Indikator Pendidikan Indonesia 2009* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2009), hlm. 87

Tabel I.1
Penduduk 15 + yang Bekerja menurut Pendidikan
Tahun 2008-2012

Tingkat pendidikan/ Level of education	2008	2009	2010	2011	2012
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Tdk/blm sekolah	647,274 (4,46%)	512,887 (3,56%)	271,197 (1,89%)	329,897 (2,26%)	389,903 (2,67%)
Tdk/blm tamat SD	2,026,364 (13,98%)	2,113,824 (14,66%)	1,598,394 (11,14%)	1,717,632 (11,75%)	1,722,442 (11,77%)
SD	6,589,652 (45,45%)	6,537,839 (45,35%)	6,934,415 (48,34%)	6,703,655 (45,86%)	6,563,627 (44,87%)
SLTP Umum/SMP	2,041,578 (14,08%)	2,027,265 (14,06%)	2,171,866 (15,14%)	2,475,650 (16,93%)	2,368,707 (16,19%)
SLTP Kejuruan	172,652 (1,19%)	152,115 (1,06%)	144,045 (1%)	156,318 (1,07%)	161,058 (1,1%)
SLTA Umum/SMU	1,509,102 (10,41%)	1,633,229 (11,33%)	1,887,732 (13,16%)	1,658,941 (11,35%)	1,666,586 (11,35%)
SLTA Kejuruan/SMK	843,188 (5,82%)	757,187 (5,25%)	703,221 (4,9%)	821,009 (5,62%)	985,440 (6,74%)
Diploma I/II	182,956 (1,26%)	157,955 (1,1%)	115,891 (0,81%)	136,542 (0,93%)	193,325 (1,32%)
Akademi/Diploma III	159,312 (1,1%)	192,057 (1,33%)	163,101 (1,14%)	216,957 (1,48%)	172,560 (1,18%)
Universitas	327,342 (2,26%)	333,381 (2,31%)	355,934 (2,48%)	402,333 (2,75%)	405,628 (2,77%)
Total	14,499,420 (100%)	14,417,739 (100%)	14,345,796 (100%)	14,618,934 (100%)	14,629,276 (100%)

Sumber : Data Statistik, Diolah

Dari data diatas dapat dilihat struktur pendidikan Jawa Barat dari tahun ke tahun selalu didominasi dengan pekerja dengan tingkat lulusan sekolah dasar, dengan persentase sebesar 40% keatas. Jika dijumlahkan dengan pekerja yang lulusan pendidikannya dibawah jenjang sekolah dasar (tidak sekolah atau tidak lulus SD) akan menghasilkan jumlah yang fantastis yaitu 50% lebih pekerja di Jawa Barat adalah dengan tingkat pendidikan tertinggi sekolah dasar. Sedangkan

partisipasi pekerja dengan lulusan Diploma dan Universitas dari tahun 2008 sampai 2012 hanya mencapai sekitar 5%. Hal ini membuktikan bahwa tenaga kerja di Jawa Barat masih memiliki tingkat keahlian yang rendah dilihat dari jenjang pendidikan terakhir ditamatkan oleh pekerja di Jawa Barat lebih dari 50% dengan tamatan sekolah dasar.

Jika dilihat dari sisi penggunaan, secara dominan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat didorong oleh konsumsi rumah tangga. Berikut ini adalah struktur PDRB Jawa Barat berdasarkan penggunaan :

Tabel I.2
Struktur PDRB Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga	64,02	64,46	63,30	62,89	61,82
2	Pengeluaran Konsumsi Nirlaba	0,56	0,90	0,56	0,55	0,54
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,43	6,47	5,81	5,83	5,51
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	17,26	17,36	17,24	17,78	18,18
5	Perubahan Stok	2,97	(0,86)	(0,34)	1,05	1,42
6	Ekspor	41,97	42,15	44,78	44,78	44,44
7	Impor	33,21	30,47	31,35	32,87	31,98
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga Jawa Barat mengalami fluktuasi dari tahun ketahun, sejak tahun 2010 persentase distribusi konsumsi rumah tangga cenderung mengalami penurunan. Meskipun demikian pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang tertinggi terhadap PDRB Jawa Barat dengan nilai distribusinya berada diatas 50% setiap

tahunnya. Konsumsi yang tinggi akan menimbulkan rangsangan untuk meningkatkan output perusahaan, namun efek buruk yang dapat timbul adalah mengekang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang⁷.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya konsumsi masyarakat, misalnya meningkatnya jumlah penduduk, terjadinya perubahan harga, adanya kenaikan gaji pegawai dan besarnya kontribusi bank yang ada di Jawa Barat dalam memberikan kredit konsumtif kepada masyarakat. Konsumsi rumah tangga yang tinggi seiring dengan tingginya jumlah kredit yang diberikan oleh perbankan untuk kegiatan konsumtif seperti kredit kendaraan bermotor dan kredit kepemilikan rumah. Berikut ini adalah posisi pinjaman yang diberikan bank di Jawa Barat :

Tabel I.3
Pinjaman yang Diberikan Bank di Jawa Barat
Tahun 2008-2012
(Juta Rp)

Jenis Penggunaan	2008	2009	2010	2011	2012
Konsumsi	61,682,278	71,202,364	83,654,975	113,477,749	134,374,342
Modal Kerja	79,429,759	83,154,081	94,883,534	120,498,646	151,683,345
Investasi	25,166,911	27,051,181	32,362,634	41,984,611	56,744,225
Jumlah	166,278,947	181,407,626	210,901,143	275,961,005	342,801,912

Sumber : Keuangan Daerah Jawa Barat Bank Indonesia, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kredit yang diberikan perbankan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Proporsi pemberian kredit investasi pada provinsi Jawa Barat merupakan yang paling sedikit dibandingkan dengan jenis kredit lainnya.

⁷ Tim liputan metro tv, *Kurangi Kredit Konsumtif*, 2010
<http://metronews.com/metromain/news/2012/0316/85220/BI-InginKurangi-Kredit-Konsumtif> (diakses tanggal 25 September 2014)

Bank dan lembaga keuangan masih banyak yang menyalurkan kredit ke sektor yang kurang produktif, seperti kredit konsumsi. Dampaknya, kredit yang diberikan kurang signifikan dalam meningkatkan kapasitas perekonomian. Selain itu, pemerintah dihadapkan dengan tantangan dalam membangkitkan peluang bisnis yang dewasa ini sangatlah berat oleh karena adanya beberapa faktor yang berpengaruh seperti keterbatasan infrastruktur, hukum dan tingkat kriminalitas yang ada pada daerah tersebut. Hal ini menjadikan rendahnya peran perbankan dalam mendorong perekonomian. Padahal bagi daerah yang berada di Negara yang sedang berkembang, investasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan untuk pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh pendidikan dan kredit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh antara jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi ?
2. Adakah pengaruh Sumber Daya Alam terhadap pertumbuhan ekonomi ?
3. Adakah pengaruh antara pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi ?

4. Adakah pengaruh antara konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi ?
5. Adakah pengaruh antara kredit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi ?

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai identifikasi masalah diatas, terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Karena keterbatasan peneliti dalam upaya pemecahan masalah tersebut, serta keterbatasan waktu yang peneliti miliki maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada masalah tingkat pendidikan, kredit investasi dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 hingga tahun 2012.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh antara tingkat pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi ?
2. Apakah ada pengaruh antara kredit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi ?
3. Apakah ada pengaruh antara tingkat pendidikan dan kredit investasi terhadap pertumbuhan ekonomi ?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan menambah referensi informasi serta khasanah ilmu tentang tingkat pendidikan, kredit investasi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya jika akan melakukan penelitian yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan kredit investasi.